

**DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
SERTA PEMBIAYAANNYA DI KABUPATEN LOMBOK BARAT**

PUTU KARISMAWAN

Fak. Ekonomi Universitas Mataram

ABSTRAK

Keinginan untuk makin meningkatkan kesejahteraan masyarakat mendorong pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat, bersama-sama dengan masyarakat berupaya melaksanakan pembangunan di segala bidang. Konsekuensinya adalah kebutuhan akan dana pembangunan yang makin besar. Masalahnya adalah bahwa anggaran belanja selalu lebih besar dari anggaran pendapatan, sehingga menyebabkan defisit anggaran. Sumber-sumber pendapatan yang ada seperti, Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk sebagian besar daerah masih terlalu kecil untuk dapat menutupi sejumlah besar belanja daerah. Begitu juga Dana Alokasi Umum (DAU) dan Khusus (DAK), yang menjadi primadona bagi daerah, tidak mencukupi untuk menutupi belanja daerah. Terkait dengan itu, pemerintah daerah mengambil langkah-langkah mencari sumber-sumber penerimaan daerah. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun lalu merupakan sumber pembiayaan pertama. Alternatif lain adalah meminjam dari pihak ketiga, dan atau menggunakan dana cadangan. Hasil studi menunjukkan bahwa selama kurun waktu 2006-2009, sumber pembiayaan utama untuk menutupi defisit adalah dari SILPA, sementara dari pinjaman dan dana cadangan hanya sebagai pelengkap, walaupun Kabupaten Lombok Barat termasuk salah satu Kabupaten yang hutangnya selama kurun waktu itu terus meningkat sejalan dengan perkembangan defisit APBD, namun rasionya masih dibawah tiga persen dari Nilai PDRB, yang berarti masih dalam kategori aman sesuai dengan amanat undang-undang.

Kata Kunci: APBD, PAD, DAU, Defisit, SILPA, Hutang pemerintah daerah.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dinamika otonomi yang bergulir seiring dengan tuntutan reformasi telah membawa pengaruh terhadap kegairaan membangun di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keinginan untuk makin meningkatkan kesejahteraan masyarakat mendorong pemerintah daerah bersama-sama dengan masyarakat untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang. Konsekuensi logis dari makin gencarnya kegiatan pembangunan adalah makin besarnya kebutuhan dana untuk membiayai seluruh aktifitas pembangunan, bahkan ada tendensi ketersediaan dana selalu lebih sedikit dibandingkan yang dibutuhkan. Pepatah lama, lebih besar pasak dari pada tiang, sepertinya tidak usang, kebutuhan anggaran belanja selalu lebih besar dari anggaran pendapatan. Sumber-sumber pendapatan yang ada sepertinya tidak mencukupi untuk melaksanakan pembangunan disegala bidang. Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk sebagian besar daerah masih terlalu kecil untuk dapat menutupi sejumlah besar pengeluaran daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) dan Khusus (DAK), yang menjadi primadona bagi daerah tidak mencukupi untuk menutupi keterbatasan PAD. Untuk mengejar angan-angan terwujudnya masyarakat adil dan makmur, hampir semua pemerintah daerah mengambil langkah alternatif yaitu meminjam dari pihak ketiga. Seperti dilansir di koran Lombok Post tanggal 1 Agustus 2011, bahwa lebih dari 80 persen pemerintah daerah di Indoesia punya hutang, yang terakumulasi mencapai 7,2 trilyun rupiah.

Jika sudut pandang pengamatan diciutkan pada salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), maka jelas sekali tampak proses perkembangan dinamika pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama-sama dengan masyarakat. Ini sudah pasti terkait dengan makin meningkatnya kebutuhan akan dana pembangunan.

Kabupaten Lombok Barat telah mengalami pemekaran sebanyak tiga kali. Pemekaran pertama terjadi pada saat dibentuknya Kota Mataram, meliputi tiga kecamatan yaitu Kecamatan Mataram, Ampenan dan Cakranegaramana, yang mana tiga kecamatan tersebut merupakan wilayah pusat pemerintahan, pusat perdagangan, sekaligus sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Kabupaten Lombok Barat,

sebelum pemekaran. Ini berdampak pada menurunnya PAD bagi Kabupaten Lombok Barat pasca pemekaran. Pemekaran ke dua terhadap Kabupaten Lombok Barat, terjadi seiring dengan pemantapan pelaksanaan otonomi daerah, diputuskan pada tahun 2008, dimana sebagian dari wilayah Lombok Barat bagian utara, meliputi Kecamatan Pemenang, Tanjung, Bayan, Gangga dan Kayangan, menjadi bagian wilayah Kabupaten Lombok Utara. Ini juga berdampak pada menurunnya PAD Lombok Barat, karena salah satu Kecamatan yaitu Kecamatan Pemenang, dengan tiga Gili yang sangat termasyhur yaitu Gili Air, Terawangan dan Meno, yang merupakan Kawasan Pariwisata utama di Pulau Lombok, NTB pada umumnya, adalah sumber PAD bagi kabupaten Lombok Barat sebelum pemekaran. Namun tuntutan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang makin sejahtera tidak dapat ditunda. Keinginan untuk melaksanakan pembangunan secara simultan disemua bidang kehidupan membutuhkan dana yang besar, dan makin tahun makin meningkat, sementara sumber-sumber pendapatan daerah perkembangannya lambat, baik sumber PAD maupun sumber dari pemerintah provinsi dan pusat, sehingga setiap tahun kabupaten Lombok Barat mengalami defisit APBD. Tahun 2005 defisit APBD Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp.9 milyar lebih, dan pada tahun 2009 meningkat menjadi Rp.12,4 milyar atau meningkat 85% dibandingkan keadaan tahun 2007.

Pinjaman merupakan sumber alternatif yang dapat digunakan untuk menutupi defisit anggaran belanja, namun jelas ia membawa konsekuensi membayar pokok pinjaman beserta bunganya, pada saat jatuh tempo. Besarnya pinjaman sedapat mungkin disesuaikan dengan kemampuan daerah untuk mengembalikan pinjaman dan tidak membebani APBD.

Defisit APBD Lombok Barat, selama kurun waktu 2005-2009 sebagian dibiayai dengan dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Lalu, sebagian lagi ditutupi melalui pinjaman (hutang). Hutang Kabupaten Lombok Barat tahun 2005 senilai hampir Rp.3 milyar, menurun tahun 2006 menjadi Rp.0,8 milyar, dan tahun-tahun berikutnya meskipun nampak trend meningkat tetapi tampak landai, tahun 2009 hutang Kabupaten Lombok Barat mencapai Rp.1,40 milyar atau peningkatannya kurang dari 1% dibandingkan keadaan tahun 2008, senilai Rp.1,37 milyar.

Trend pergerakan angka defisit anggaran belanja dan hutang agaknya terpola seiring sejalan. Ini yang mendasari gagasan untuk meneliti kemampuan daerah untuk menutupi defisit serta signifikansi hubungan besaran defisit anggaran belanja dengan hutang di Kabupaten Lombok Barat.

Rumusan Masalah

Dari uraian tersebut di atas dirumuskan permasalahan adalah :

1. Apakah penerimaan pembiayaan mampu untuk menutupi defisit APBD Kabupaten Lombok Barat secara berkesinambungan?
2. Apakah defisit anggaran pendapatan dan belanja daerah secara signifikan berdampak pada makin meningkatnya hutang (pinjaman) pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat?

TINJAUAN TEORITIS

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan melalui peraturan daerah (UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara). APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari : Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Aspek penting dalam penyusunan anggaran daerah adalah penyalarsan kebijakan (policy), perencanaan (planning) dengan penganggaran (budget) antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah agar tidak tumpang tindih. Penyusunan Anggaran pada dasarnya bertujuan untuk menyalarskan kebijakan ekonomi makro dengan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah, dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik.

Pada hakekatnya, anggaran merupakan salah satu alat yang memegang peranan penting dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Sumber-sumber Pendapatan Daerah

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sebagaimana diatur dalam pasal 6 UU Nomor 33 tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari (a) Hasil Pajak Daerah, (b) Hasil Retribusi Daerah, (c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan (d) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

b. Dana Perimbangan

Sebagaimana diatur dalam pasal 10 UU Nomor 33 tahun 2004, Dana Perimbangan terdiri dari : Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). (Darise, Nurlan. 2006:83)

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari : Bantuan Dana Hibah merupakan dana cuma-cuma atau hadiah yang bersumber dari dalam atau luar negeri yang diberikan kepada suatu daerah melalui pemerintah pusat yang diatur dengan peraturan pemerintah. Dana Darurat yaitu kebutuhan dana yang mendesak yang disebabkan bencana atau kejadian luar biasa yang tidak bisa ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD. Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Propinsi atau Pemda Lainnya. (Darise, Nurlan. 2006:107).

Belanja Daerah

Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih pada tahun anggaran yang bersangkutan (UU No. 32 tahun 2004). Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. (Darise, Nurlan. 2006:145).

Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, pada tahun anggaran 2005-2006 struktur Belanja Daerah dalam APBD Kabupaten Lombok Barat terdiri atas Belanja Aparatur dan Belanja Pelayanan Publik. Pada tahun anggaran 2007-2009 struktur Belanja Daerah Dalam APBD Kabupaten Lombok Barat terdiri atas Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kebijakan Anggaran Defisit

Kuangan defisit (*defisit financing*) diartikan sebagai setiap pengeluaran negara yang melebihi pengeluaran. Keuangan defisit merupakan metode paling mujarab bagi peningkatan pembangunan ekonomi di negara terbelakang (Jhingan, 2008). Pengertian defisit dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002. Defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila anggaran pendapatan daerah lebih kecil dari anggaran belanja daerah. Defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibiayai antara lain dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, pinjaman daerah, penjualan obligasi daerah, hasil penjualan asset/kekayaan milik daerah yang dipisahkan, transfer dari dana cadangan, yang dianggarkan pada kelompok penerimaan pembiayaan daerah. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun berkenaan merupakan selisih lebih dari surplus/defisit ditambah pos penerimaan pembiayaan dikurangi dengan pos pengeluaran pembiayaan.

Pasal 17 ayat 3 dalam UU Keuangan Negara memberikan suatu petunjuk yang jelas bahwa pengelolaan keuangan defisit dimungkinkan ditingkat pemerintahan daerah sejauh ada kejelasan darimana sumber-sumber pembiayaan defisit tersebut, dan dengan jumlah defisit tertentu. Suatu defisit dalam APBD dimungkinkan maksimal 3% dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah yang bersangkutan, dengan total pinjaman daerah dibatasi maksimal 60% dari PDRB-nya.

Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah transaksi keuangan yang di maksudkan untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. (Darise, Nurlan. 2006:150).

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Apabila terjadi defisit maka pemerintah daerah menutupinya dengan penerimaan pembiayaan, sedangkan apabila terjadi surplus maka pemerintah daerah memanfaatkannya untuk pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan mencakup : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan/aset Daerah Yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, Penerimaan Piutang Daerah, Penerimaan Kembali Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah.

Pengeluaran Pembiayaan mencakup : Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, Pembayaran Pokok Utang, Pemberian Pinjaman Daerah.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan digunakan untuk menganggarkan sisa lebih antara pembiayaan netto dengan surplus/defisit APBD. Pembiayaan netto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan untuk menutupi defisit anggaran yang direncanakan.

Hipotesis

1. Diduga bahwa defisit APBD Kabupaten Lombok Barat dapat dibiayai dari penerimaan pembiayaan secara berkeselimbangan.
2. Diduga bahwa defisit APBD tidak signifikan pengaruhnya terhadap perkembangan hutang pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif diartikan sebagai metode dalam meneliti suatu obyek atau peristiwa pada masa sekarang yang bertujuan untuk memperoleh gambaran secara sistematis mengenai sifat-sifat hubungan antar fenomena serta dapat ditarik kesimpulannya (Nasir, 2005). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kemampuan pembiayaan defisit APBD Kabupaten Lombok Barat, serta hubungan kausalitas atau korelasi antara variabel difisit APBD dengan pinjaman pemerintah daerah, di mana defisit APBD sebagai variabel bebas, dan hutang sebagai variabel terikat.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang sesuai adalah metode khusus, yaitu suatu metode penelitian dengan penelusuran data sekunder yang bersumber dari dinas instansi terkait, seperti data pendapatan dan belanja daerah, penerimaan pmbiayaan, ditelusuri melalui laporan yang diterbitkan oleh dinas pendapatan dan atau Badan Pusat statistik.

Analisa Data

Untuk menguji hipotesa pertama digunakan analisa tabel dengan mendekomposisi sumber-sumber pembiayaan serta menghitung kontribusi dari masing unsur pembiayaan. Jika kontribusi terbesar bukab dari hutang ataupun dari dana cadangan, maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan pembiayaan adalah berkesinambungan (*sustainable*).

Untuk menguji hipotesa kedua, digunakan alat ujia sebagai berikut:

- a. analisa regresi linier sederhana, untuk menganalisis hubungan antara defisit APBD dengan hutang, yaitu (Soeharno, 2007,p.306):

$$Y_i' = b_0 + b_1 X + e_i$$

Dimana : Y= hutang (dalam rupiah), X= defisit APBD (dalam rupiah), b₀: konstanta, b₁ : koefisen regresi.
e = faktor pengganggu.

Untuk memperoleh nilai b₀ dan b₁ digunakan metode *Ordinary Least Square (OLS)*.

- b. Uji t untuk menguji signifikansi dampak defisit anggaran belanja terhadap hutang, yaitu

$$t_h = \frac{b_i}{S_{bi}} \qquad S_{bi} = \frac{\sigma}{\sqrt{\sum x^2}} \qquad \sigma = \sqrt{\frac{\sum y^2 - b_i \sum x^2}{n - k}}$$

c. Untuk mengetahui kuatnya hubungan serta sumbangan variabel defisit terhadap variabel hutang digunakan rumus:

Koefisien korelasi: $r = \sqrt{r^2}$ Koefisien Determinasi: $r^2 = 1 - \frac{\sum e_i^2}{\sum y_i^2}$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Barat

Anggaran pendapatan dan Belanja Kabupaten Lombok Barat, selama kurun waktu 2005 – 2009, rata-rata pertahun masing-masing senilai Rp.505,8 milyar dan Rp.517,9 milyar, sehingga rata-rata setiap tahun mengalami defisit sebesar Rp.7,7 milyar. Lebih rincinya seperti tampak pada tabel 1.

Tabel 1. Defisit APBD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2005 – 2009

Tahun	Pendapatan (milyar Rp)	Belanja (milyar Rp)	Defisit (milyar Rp)	Laju defisit (%)
2005	331,0	340,1	9,2	-
2006	478,2	482,8	4,6	-49,82
2007	559,5	565,3	5,8	26,33
2008	646,8	653,6	6,7	14,93
2009	513,6	526,0	12,4	86,74
Rata-rata	505,8	517,9	7,7	

Sumber: Lombok Barat Dalam Angka,2005-2009. diolah.

Sumber-sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat selama kurun waktu tersebut, seperti tampak pada tabel 2, secara dominan berasal dari Dana Perimbangan, khususnya Dana Alokasi Umum (DAU). Kontribusi Dana Perimbangan terhadap Total Pendapatan Lombok Barat per tahun rata-rata 87,91%, dan kontribusi DAU per tahun rata-rata 73% dari total Pendapatan Kabupaten Lombok Barat. Ini cerminan dari tingkat kemandirian yang belum mantap, tetapi menunjukkan tendensi progresif, yang ditandai oleh makin meningkatnya PAD, kecuali tahun 2008 terjadi penurunan. Ini karena pemekaran, dimana sebagian daerah Lombok Barat sumber PAD masuk wilayah Lombok Utara.

Tabel 2. Kontribusi PAD, Dana Perimbangan, Lain-lain Pendapatan Terhadap Total APBD Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2005-2009 (milyar rupiah).

Tahun	PAD	%	Dana Perimbangan	%	Lain-lain Pendapatan	%
2005	26,8	8,09	293,0	88,49	11,3	3,41
2006	32,4	6,78	444,9	93,04	0,9	0,19
2007	36,7	6,56	511,1	91,35	11,7	2,09
2008	38,6	5,97	570,7	88,23	37,5	5,80
2009	32,3	6,29	402,9	78,45	78,4	15,26
Rata-rata	33,4	6,74	444,5	87,91	28	26,75

Sumber: Lombok Barat Dalam Angka, 2005-2009, data di olah.

Tabel 3. Komposisi Dana Perimbangan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2005-2009 (milyar rupiah).

Tahun	BHP&BHBP	% to DP	DAU	% to DP	DAK	% to DP
2005	28,6	9,76	243,9	83,24	12,6	4,30
2006	26,7	6,00	372,2	83,66	33,7	7,57
2007	34,5	6,75	424,0	82,96	52,5	10,27
2008	32,0	5,61	479,2	83,97	59,5	10,43
2009	27,8	6,90	324,1	80,44	50,9	12,63
Rata-rata	29,9	6,73	368,7	82,95	41,8	9,40

Sumber: Lombok Barat Dalam Angka, 2005-2009, data di olah.

Ket: BHP & BHBP= Bagi Hasil Pajak dan Bagi hasil Bukan Pajak; DP:Dana Perimbangan Defisit

APBD yang terjadi setiap tahun , jika dibandingkan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Lombok Barat, tampak seperti pada tabel 4.

Tabel 4. Perbandingan Antara PDRB dan Defisit APBD Kabupaten Lombok Barat 2005-2009

Tahun	PDRB (milyar Rp)	Defisit APBD (milyar Rp)	Rasio (%)
2005	2.096	9,2	0,44
2006	2.411	4,6	0,19
2007	2.741	5,8	0,21
2008	3.127	6,7	0,21
2009	3.550	12,4	0,35
Rata-rata	2.785	7,7	0,28

Sumber: Lombok Barat Dalam Angka, 2005-2009, diolah
Ket. PDRB Lombok Barat atas dasar Harga Berlaku.

Berdasarkan data tabel 4, dapat disimpulkan bahwa pinjaman pemerintah daerah masih dalam taraf aman, sesuai ketentuan undang-undang dan atau peraturan pemerintah, dimana rasio hutang terhadap PDRB yang ditoleransi oleh undang-undang adalah maksimal 3%.

Sumber-sumber Pembiayaan Kabupaten Lombok Barat

Pembiayaan daerah adalah transaksi keuangan yang di maksudkan untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah (Kepmendagri Nomor 29 tahun 2004). Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Apabila terjadi defisit maka pemerintah daerah menutupinya dengan penerimaan pembiayaan, sedangkan apabila terjadi surplus maka pemerintah daerah memanfaatkannya untuk pengeluaran pembiayaan.

Untuk melihat perkembangan realisasi anggaran pembiayaan daerah Kabupaten Lombok Barat, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5. Perkembangan Realisasi Anggaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2005-2009 (Dalam Milyar Rupiah)

Tahun	Penerimaan	Pengeluaran	Pembiayaan Netto
2005	14,7	5,5	9,2
2006	27,6	7	20,6
2007	38,2	1,2	37,0
2008	48,5	16,3	32,2
2009	26,9	0,4	26,5
Rata-Rata	31,1	6,0	25,1

Sumber : Lombok Barat Dalam Angka 2005-2009, diolah.

Tabel 6. Sumber-sumber Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Lombok Barat, Tahun 2005-2009 (Milyar rupiah)

Tahun Anggaran	Sumber Penerimaan Pembiayaan			Sumber Pengeluaran Pembiayaan		
	SILPA	Pinjaman Daerah	Pencairan Dana Cadangan	Penyertaan Modal (Investasi) Pemda	Pembentukan Dana Cadangan	Pembayaran Pokok Utang
2005	11,3	2,9	0,5	3,8	0,5	1,2
2006	26,8	0,8	-	7,0	-	-
2007	36,7	1,5	-	1,2	-	-
2008	42,8	1,4	4,3	1,9	4,3	10,1
2009	25,5	1,4	-	0,4	-	-
Rata-Rata	28,6	1,6	0,9	2,8	0,9	2,3

Sumber: Lombok Barat Dalam Angka 2005-2009, diolah.

Untuk melihat kontribusi dari sumber-sumber pembiayaan daerah yang diupayakan oleh pemerintah daerah terhadap jumlah anggaran pembiayaan daerah dalam menutupi defisit APBD Kabupaten Lombok Barat Tahun anggaran 2005-2009, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 7. Kontribusi Sumber-Sumber Pembiayaan Daerah Terhadap Defisit APBD Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2005-2009

Tahun	Kontribusi Sumber-Sumber Penerimaan Daerah Terhadap Defisit APBD (Persentase)			
	SILPA (%)	Penerimaan Pinjaman Daerah (%)	Pencairan Dana Cadangan (%)	Pembiayaan Netto (%)
2005	120,89	32,76	5,10	0,00
2006	583,92	16,42	0	348,99
2007	632,20	26,67	0	535,14
2008	642,34	20,55	63,74	383,70
2009	205,16	11,32	0	166,83

Sumber : Lombok Barat Dalam Angka, 2005-2009. diolah.

Berdasarkan dari Tabel 7 di atas, dapat dilihat bahwa dari sumber-sumber pembiayaan daerah yang diupayakan oleh pemerintah daerah yang paling besar kontribusinya adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA) dengan jumlah kontribusi rata-rata di atas 100 %, disusul Penerimaan Pinjaman Daerah dengan kontribusi rata-rata sebesar 10%, dan Pencairan Dana Cadangan dengan jumlah kontribusi rata-rata sebesar 3,6%.

Kemampuan daerah untuk menutupi defisit APBD, yang tercermin dari ketersediaan Pembiayaan netto, yang merupakan selisish antara total penerimaan dengan total pengeluaran (pembayaran hutang, penyertaan modal, pembentukan dana cadangan), seperti tampak pada tabel 7, kecuali untuk tahun 2005, dengan rata-rata 166,83% sangat optimis dapat menutupi defisit.

Dilihat dari rasio hutang terhadap PDRB Kabupaten Lombok Barat tahun anggaran 2005-2009, tampak bahwa rasionya rata-rata 0,06%. Ini rasio yang sangat kecil dibandingkan dengan peluang yang diberikan oleh peratng diberikan oleh peraturan batas maksimal yang digariskan yaaitu maksimal 60% dari PDRB.

Tabel 8. Rasio Hutang Terhadap PDRB Kabupaten Lombok Barat 2005-2009

Tahun	Rasio Hutang Terhadap PDRB (%)
2005	0,14
2006	0,03
2007	0,05
2008	0,04
2009	0,04
Rata-rata	0,06

Sumber: Lombok Barat Dalam Angka, 2005-2009, diolah

Signifikansi Dampak Defisit APBD terhadap Perkembangan Hutang

Analisis regresi menunjukkan hasil konstanta $b_0 = \text{Rp.}805$ juta, koefisen regresi $b_1 = 0,105$, sehingga persamaan regresinya adalah: $Y' = 805 + 0,105X$. Uji Signifikansi koefisen regresi didiperoleh hasil $t_h = 0,331$. Ini mengandung makna bahwa pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ ternyata dampak defisit tidak signifikan terhadap peningkatan hutang pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat. Koefisen Korelasi $r = 0,39$, bermakna bahwa kaitan antara besaran defisit dengan hutang lemah. Koefisen Determinasi $r^2 = 15,54\%$, bermakna bahwa variabel defisit hanya menjelaskan sebesar 15,54% tentang perubahan variabel hutang, dengan lain perkataan ada faktor lain yang lebih banyak dapat menjelaskan perubahan variabel hutang, misalnya variabel tingkat bunga kredit.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan di atas, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut :

1. Sumber-sumber pembiayaan daerah dapat menutupi defisit secara sinambung, dan yang paling dominan dalam menutupi defisit APBD Kabupaten Lombok Barat tahun anggaran 2005-2009 adalah Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SILPA), Penerimaan pinjaman daerah serta Pencairan dana cadangan hanya pelengkap.
2. Perkembangan hutang pemerintah Kabupaten Lombok Barat masih dalam dalam taraf aman, mengingat rasio hutang terhadap PDRB Kabupaten Lombok Barat relatif kecil.
3. Defisit APBD tidak secara signifikan berpengaruh terhadap perkembangan hutang Kabupaten Lombok Barat tahun anggaran 2005-2009.

Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan kinerja kemandirian, Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat harus terus menggali dan memanfaatkan sumber-sumber keuangan lokal serta potensi-potensi pendapatan yang ada di daerah secara optimal, khususnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) misalnya dari sektor pajak daerah (hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dll).
2. Selain mengoptimalkan dari sisi pendapatan asli daerah (PAD), pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat juga dapat mengoptimalkan sumber-sumber pembiayaan, seperti pinjaman, untuk mendanai kegiatan pembangunan, asal tetap mengacu pada ketentuan batas maksimal dari rasio hutang terhadap PDRB.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. *Lombok Barat Dalam Angka Tahun 2005-2006*, BPS: NTB.

.....*Lombok Barat Dalam Angka Tahun 2007*, BPS: NTB.

....., *Lombok Barat Dalam Angka Tahun 2008*, BPS: NTB.

....., *Lombok Barat Dalam Angka Tahun 2009*, BPS: NTB.

....., *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*.

....., *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.

Darise, Nurlan. 2006. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. PT. Indeks Kelompok Gramedia: Gorontalo.

Jhingan, ML. 2008. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Nasir, Mohamad. 2005. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia: Jakarta.

Soeharno, 2007, *Ekonomi Manajerial*. Penerbit: Andi. Yogyakarta.